



Judul : DPR Sahkan UU Pemilu
Tanggal : Jumat, 21 Juli 2017
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 1 & 15

DPR Sahkan UU Pemilu

JAKARTA-DPR akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu) melalui rapat paripurna yang berlangsung siang kemarin hingga dini hari tadi.

Pengambilan keputusan dilakukan secara aklamasi oleh anggota DPR dari enam fraksi, yakni PDIP, Perjuangan, Golkar, NasDem, PKB, Hanura, dan PPP. Empat fraksi lain memilih *walkout* yakni Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN.

Paripurna ini memutuskan memilih opsi Paket A yang selama ini didukung oleh pemerintah beserta enam fraksi pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dengan demikian, ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) yang akan digunakan pada Pemilu 2019 adalah 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional. Isu *presidential threshold* ini merupakan yang paling alot selama pembahasan RUU Pemilu berlangsung.

(Kepada Hal 15))



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

DPR Sahkan UU Pemilu

((dari Hal 1

Adapun isi Paket A selengkapnya yang dimenangkan parpol pendukung Jokowi, yakni *presidential threshold: 20-25%, parliamentary threshold: 4%*, sistem pemilu: terbuka, jumlah kursi per dapil: 3-10, dan metode konversi suara: *sainte-lague* murni.

Aksi walkout tadi malam juga dilakukan oleh pimpinan DPR, yakni Fadli Zon, Taufik Kurniawan, dan Agus Hermanto. Mereka mengingati langkah fraksi-nya. Saat pengambilan keputusan, pimpinan DPR yang tersisa tinggal dua yakni Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Setya Novanto akhirnya mengam-bilalih pimpinan sidang yang di-inggalkan Fadli Zon.

Novanto kemudian mem-bacakan jumlah kehadiran anggota DPR yang hadir pada pengambilan keputusan, yakni 538 orang. Anggota yang men-dukung opsi Paket A menurut dia ada 322, pendukung Paket B sebanyak 216. "Kita putuskan apakah opsi A secara aklamasi bisa disetujui?" ujar Novanto yang dijawab setuju oleh seluruh peserta sidang. ta-setuju oleh peserta rapat.

Di luar parpol pendukung pemerintah, empat fraksi lain mendukung Paket B. Paket B terdiri atas *presidential threshold: 0%, parliamentary threshold: 4%*, sistem pemilu: terbuka, jumlah kursi dapil: 3-10, dan metode konversi suara: kuota hare.

Sebelum voting pengambilan keputusan, empat fraksi yakni Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS berusaha agar voting tidak dilakukan tadi malam, tujuannya agar lobi-lobi dilanjutkan. Mereka meminta voting ditunda hingga Senin (24/7).

Karena terdapat perbedaan pandangan, rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon akhirnya me-mutuskan dilakukan voting untuk menentukan kapan waktu voting dilakukan.

Hasilnya, anggota DPR yang setuju voting dilakukan tadi malam sebanyak 322 orang, mereka berasal dari PDIP, Golkar, NasDem, Hanura, PPP, dan PKB. Sedangkan yang setuju voting ditunda ke Senin sebanyak 217, yakni berasal dari Fraksi Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS.

Proses rapat paripurna se-panjang siang hingga tengah malam tadi berjalan alot. Rapat tak jarang diwarnai debat dan saling interupsi di antara anggota DPR.

Saat membuka kembali rapat paripurna setelah diskors untuk lobi pada pukul 22.00 tam di malam, Fadli Zon menyebut



Anggota DPR Fraksi PKS melakukan konsolidasi seusai musyawarah dan lobi di sela-sela rapat sidang Paripurna ke-32 masa persidangan V tahun sidang 2016-2017 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, tadi malam (foto atas). Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy (dua kanan) menyerahkan laporan hasil kerja kepada pimpinan sidang Fadli Zon.

hasil lobi-lobi mengerucut pada dua paket isu krusial RUU Pemilu. Paket tersisa yakni A atau B.

Perbedaan pandangan fraksi, terutama pada isu *presidential threshold* sudah terlihat pada pemadangan fraksi pada paripurna siang harinya. Seluruh partai politik (parpol) pendukung pemerintah mendukung Paket A. Fraksi tersebut yakni PDIP, Golkar, NasDem, Hanura, PPP, dan PKB.

Sedangkan tiga fraksi menegaskan mendukung Paket B. Fraksi tersebut yakni Gerindra, Demokrat, dan PKS. Sedangkan Fraksi PAN memilih opsi *presidential threshold 10-15%*.

Pimpinan DPR lalu menunda sidang pada pukul 14.00 dan memberi waktu kepada seluruh fraksi melakukan lobi selama dua jam. Namun, karena alotnya proses lobi yang berlangsung tertutup, rapat paripurna baru bisa dibuka kembali delapan jam kemudian, atau pada pukul 22.00.

Ketua Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Muzani, dalam

pandangan fraksinya menolak berapa pun angka *presidential threshold* karena dapat mencedera demokrasi dalam pelaksanaan Pemilu 2019.

"Partai Gerindra menginginkan agar musyawarah tetap mufakat. Bagi Gerindra, *threshold 20%*, atau *threshold beberapa pun tak sesuai. Kami tak ingin Pilpres 2019 akan dicde-rai dengan pelanggaran ins-kuontisional," ucap Muzani di ruang rapat paripurna, Gedung DPR.*

Hanya sampaikan Fraksi PKS melalui juru bicaranya, Sutriyono. PKS memandang *presidential threshold* ketika ditidakkan akan memberi kesempatan yang luas kepada rakyat Indonesia untuk menggunakan haknya dipilih seba-gai presiden."

Di samping itu, peniadaan *presidential threshold* membuat pemilu lebih berkeadilan dan membentuk kesetaraan karena setiap partai politik bisa mengajukan capres-cawapres sendiri. "Dengan demikian rakyat akan diuntungkan ba-

nyak calon alternatif pemimpin bangsa," papar Sutriyono.

Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa RUU Pemilu memang seharusnya diselesaikan kemarin. Dia mengaku meng-hargai jika ada perbedaan pendapat oleh fraksi-fraksi. "Soal ada yang bersikukuh kita hargai saja, itu sah-sah saja. Sema-ga malam ini selesai," ujar Tjahjo seusai skorsing sidang paripurna kedua kalinya pada pu-kul 17.40 WIB tadi malam.

Di kembali membantah *presidential threshold 20%* akan melahirkan 'calon' presiden tunggal. Apalagi, angka *threshold* yang sama sudah digunakan dalam dua pilpres sebelumnya dan pesertanya selalu lebih dari satu pasangan.

Dengan disahkannya RUU Pemilu ini dipastikan akan ada gugatan ke Mahkamah Konsti-tusi. Pasal yang akan digugat antara lain *presidential threshold* karena dinilai bertentangan dengan konstitusi.

© kiswondari/okezone